



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dengan : 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Menteri Kesehatan.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 7 Juni 2021
Waktu : 14.35 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : Masukan dan pendapat terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 13 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 10 hadir fisik
- 2 hadir virtual
- 1 Izin
2. Pemerintah:
a. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
b. Menteri Kesehatan.
3. DPD RI
- Filep Wamafwa, S.H., M.Hum

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Pansus DPR RI mengapresiasi kehadiran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta Menteri Kesehatan RI, dapat menerima dengan baik penjelasan menteri terkait kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua dan rencana tindak lanjut ke depan.
2. Pansus DPR RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta Menteri Kesehatan RI untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah daerah di Papua dalam penyusunan kebijakan umum (*grand design*) atau peta jalan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk 20 tahun ke depan di Papua, sehingga tujuan Otsus dalam mengatasi persoalan di bidang Pendidikan dan Kesehatan di Papua dapat diatasi.
3. Pansus DPR RI mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta Menteri Kesehatan RI yang bertekad untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan di Papua.
4. Pansus DPR RI mendukung Menteri Kesehatan RI dalam melakukan 6 (enam) transformasi kesehatan khususnya di Papua agar tingkat kesehatan masyarakat Papua meningkat secara signifikan. Begitu pula usulan untuk melakukan harmonisasi regulasi strategi, implementasi, dan anggaran kesehatan.
5. Pansus DPR RI memberikan perhatian bagi akuntabilitas penggunaan dana otsus bagi Pendidikan dan Kesehatan di masa mendatang dan peran pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan terhadap penggunaan dana Otsus di bidang Pendidikan dan Kesehatan di Papua dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

KETUA PANSUS



KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A.263